



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-210⁸ - 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2023




WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan berbasis gender di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023.
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Wali kota merujuk kepada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali kota ini.
- KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Solok Tahun 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 21 Maret 2023

 WALI KOTA SOLOK 

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-218 -2023
TENTANG : PENETAPAN RENCANA
PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER TAHUN 2023

SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2026 TERHADAP RENCANA PENCAPAIAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun 2023
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda	Predikat Kota Layak Anak	Predikat	Nindya
	Persentase OPD yang sudah melaksanakan PUG melalui PPRG	%	100
	Persentase organisasi perempuan yang aktif	%	84,07
	Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja non gaji	%	4,95

WALI KOTA SOLOK

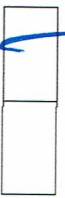
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- 2023
 TENTANG : PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN
 PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
 TAHUN 2023

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
MENINGKATKAN KOMITMEN DALAM IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH						
Tersedianya kebijakan yang responsif gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah						
Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebijakan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan dipedomani oleh seluruh stakeholder	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	<p>B03 : Tersusunnya rancangan kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>B06: 1. Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (Perda/Peraturan Daerah/Instruksi Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah)</p> <p>2. Advokasi Peraturan/kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa atau seminar/sosialisasi</p>		<p>B03 : Scan rancangan kebijakan tentang PUG (Kebijakan dapat berupa Perda / Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) berlaku sampai dengan tahun 2023 (bagi yang merubah per tahunnya)</p> <p>B06: 1. Scan kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan (Perda/Peraturan Kepala Daerah/Instruksi Kepala Daerah/Surat Edaran Kepala Daerah) yang telah termuat Nomor, Tanggal, Tandatangani Kepala Daerah dan Stempel Kepala Daerah berlaku sampai dengan tahun 2023 (bagi yang merubah per tahunnya)</p> <p>2. Scan data dukung pelaksanaan/Advokasi seperti surat atau klipng koran/rekaman video/dokumentasi (bila dilakukan melalui media massa berupa media cetak atau media elektronik) dengan data dukung surat undangan, absensi, notulen dan dokumentasi.</p>
				<p>B09: Publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>		<p>B09: Scan link publikasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten/Kota.</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
Penetapan rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersediannya tolak ukur pencapaian kinerja PUG sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana pencapaian PUG di tingkat Kabupaten/Kota	<p>B12: -</p> <p>B03: 1. Tersusunnya rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG</p> <p>2. Ditetapkannya rencana pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah</p>	B12: -	<p>B03: 1. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG</p> <p>2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang rencana pencapaian PUG (telah memuat Nomor Keputusan, tanggal ditetapkan, tandatangan Kepala Daerah dan Stempel)</p>
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terakomodinya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Ditetapkannya dokumen RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang telah mengakomodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	<p>B03: 1. Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan RKPD</p> <p>2. Orientasi tentang RKPD.</p> <p>3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD.</p> <p>4. Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.</p>	B03: - B09: - B12: -	<p>B03: 1. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusunan RKPD.</p> <p>2. Scan data dukung pelaksanaan Orientasi tentang RKPD berupa surat undangan, notulen, absensi dan dokumentasi</p> <p>3. Scan agenda kerja tim penyusun RKPD</p> <p>4. Scan daftar data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang digunakan pada penyusunan RKPD.</p>
				<p>B06: Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, yang memuat substansi: 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I</p> <p>2. Tersediannya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah</p>		<p>B06: 1. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salahsatu dasar hukum (tetap) atausermuat di BAB I</p> <p>2. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				<p>3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah</p> <p>4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</p> <p>5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>		<p>3. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan</p> <p>4. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender</p> <p>5. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender</p>
				<p>B09: Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan atau termuat di BAB I 2. Tersedianya Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya dalam BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah 3. Tercantumnya isu gender dalam sasaran pembangunan pada BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 4. Tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 5. Tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 		<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan Peraturan Kepala Daerah tentang RKKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 2. Scan BAB I Pendahuluan yang mencantumkan PUG sebagai salah dasar hukum atau termuat di BAB I 3. Scan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Data terpilah menurut jenis kelamin dan data responsif gender lainnya 4. Scan BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat isu gender dalam sasaran pembangunan 5. Scan BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang memuat program dan kegiatan terkait penanganan isu gender 6. Scan Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memuat Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender
				<p>B12: -</p>		<p>B12: -</p>



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG						
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota						
Pembentukan Kelenbagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja Kabupaten/Kota unsur OPD Kabupaten/Kota)	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG di Kabupaten/Kota	<p>B03 :</p> 1. Permintaan Nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota 2. Draft Penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota		<p>B03 :</p> 1. Scan surat permintaan nama Tim / Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten/Kota 2. Scan Draft penyusunan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota-
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Perencanaan yang Responsif Gender (PPRG) pada masing-masing OPD Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota	<p>B06:</p> 1. Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota, <p>B09:</p> <p>B12 :</p> <p>B03:</p> Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota		<p>B06:</p> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota <p>B03:</p> Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di Kabupaten/Kota
Penetapan Rencana Pokja PUG Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Tahunan Kerja	<p>B03:</p> Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota <p>B06:</p> <p>B09 :</p> <p>B12 :</p> <p>B03:</p> <p>B06:</p> <p>B09 :</p>		<p>B03:</p> Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten/Kota yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG <p>B06:</p> <p>B09 :</p>

1

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7

SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah

Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, kepala Instansi vertikal, anggota DPRD, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum	Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepala OPD dan Jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya Promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada kepala OPD, kepala Instansi vertikal, anggota DPRD, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum 2. Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/ leaflet/ brosur/media promosi lainnya	B03: Penyusunan konsep promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender B06: Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada kepala OPD, kepala Instansi vertikal, anggota DPRD, lembaga masyarakat dan dunia usaha/swasta, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum B09: Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Penyusunan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota	B03: B06: B09: B12:	B03: Scan konsep promosi dan advokasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi B06: Scan bukti pelaksanaan promosi dan advokasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi B09: Scan dokumentasi media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/leaflet/brosur/media promosi lainnya B12: Scan Laporan/Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG Kabupaten/Kota
Inventarisasi/teggung Program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terinformasikannya program dan kegiatan pada masing-masing OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	Tersedianya data dan informasi tentang program dan kegiatan OPD yang masuk dalam kriteria program dan kegiatan yang harus responsive gender	B03: B06: B09: B12:	B03: B06: B09: B12:	B03: B06: B09: 1. Scan daftar program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang termasuk dalam kriteria program dan kegiatan yang dapat dianalisis menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) gender



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				B12:		B12:

IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan di daerah

Pembentukan Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota	Tim Pemerintah Kabupaten/Kota	Tenwujudnya pelaksanaan dan Perencanaan yang Responsif Gender di Kabupaten/Kota	Tertaksananya sosialisasi pengatsumanaan gendur pada seluruh unit kerja/OPD Kabupaten/Kota	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan Nama Personel Tim Pengerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 3. Ditetapkannya Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) 5. Pelatihan Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Pengerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten/Kota 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (yang telah dikoreski oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Pengerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Pengerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Pengerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi
---	-------------------------------	---	--	--	--

				B06:		B06:
				B09:		B09:
				B12:		B12:

Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota tahun 2023	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi/data yang terpilih antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten/Kota pada website daerah	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website Pemerintah Daerah 2. Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan 	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun sebelumnya pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan
---	---------------------------	---	--	--	---

--	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya pedoman kebijakan anggaran yang responsive berupa surat edaran dalam penyusunan KUA PPAS 2024	Ditetapkannya dokumen berupa Surat Edaran.	<p>B03 : Ditetapkannya profil gender Kabupaten/Kota dalam website resmi pemerintah daerah</p> <p>B06 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2024</p> <p>B09 : Ditetapkan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2024</p> <p>B12 : Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023</p>	<p>B03 : Scan link Profil Gender Kabupaten/Kota Tahun berkenaan pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan</p> <p>B06 : Scan Surat Edaran yang memuat anggaran responsif gender pada penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan KUA PPAS tahun 2024</p> <p>B09 : Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2023</p>	
Terakomodirnya isu serta kebijakan yang responsif gender dalam dokumen KUA PPAS	Ditetapkannya dokumen KUA PPAS Tahun 2024 dan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 yang telah mengamodir hal-hal tentang kesetaraan Gender	-	-	<p>B03 : Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023</p>	<p>B03 : Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2023</p>	
				<p>B06 : Ditetapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023</p>	<p>B06 : Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Perubahan tahun 2023</p>	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
Penyusunan Anggaran responsive Gender Statement (GBS) yang dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP)	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terwujudnya program dan kegiatan OPD yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Analisis Gender Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten/Kota pada website pemerintah daerah	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota Analisis program dan kegiatan menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Penyusunan Dokumen Anggaran yang Responsif Gender/Gender Budget Statement (GBS) pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada kegiatan yang harus responsive gender dengan kriteria program dan kegiatan yang terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> mengatasi ketimpangan gender yang terjadi penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDG's 		<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten/Kota Barat antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang mengatasi ketimpangan gender yang terjadi Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang merupakan penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>) Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 ada kegiatan untuk mendukung
				<p>B12:</p> <p>Diteapkannya Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2024, yang memuat substansi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2024 		<p>B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Scan BAB I Pendahuluan pada Dokumen KUA PPAS Tahun 2024 Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2024
				<ol style="list-style-type: none"> Tercantumnya PUG sebagai salah dasar hukum di BAB I Pendahuluan pada dokumen KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 Rancangan KUA PPAS Tahun 2024 		<ol style="list-style-type: none"> Scan Nota Kesepakatan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023 Scan surat penyampaian rancangan KUA PPAS Tahun 2024 ke DPRD


RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				<p>c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (<i>service delivery</i>)</p> <p>d. Dalam rangka pencapaian SPM</p> <p>e. Mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah, atau Indikator Kinerja Utama SKPD.</p> <p>f. inovasi Daerah</p>		<p>langsung terkait dengan pencapaian SPM</p> <p>6. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Daerah atau Indikator Kinerja Utama SKPD</p> <p>7. Scan dokumen GAP dan GBS tahun 2024 pada kegiatan yang merupakan inovasi daerah</p>
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 2. Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada website resmi pemerintah daerah 3. Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning 		<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten/Kota (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak/Driver PPRG) 2. Scan dokumen Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) pada Rencana Kegiatan OPD Kabupaten/Kota 3. Scan link Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah
				<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah 2. Rekapitulasi kegiatan OPD yang telah Responsif Gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota 		<p>B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan Rekapitulasi Kegiatan SKPD yang telah responsif gender yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
Inventarisir Inovasi Daerah	Pemerintah Kabupaten/Kota	Terdatanya Inovasi Daerah dalam percepatan tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Terinformaskannya kebijakan Pemerintah yang responsif gender	<p>B03: Inventarisir Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Edaran dll terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.</p> <p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p>		<p>B03: Scan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Edaran dll terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan lima tahun terakhir.</p> <p>B06:</p> <p>B09:</p> <p>B12:</p>
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG						
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran						
Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya hasil review Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Provinsi Kabupaten/Kota	<p>B03: 1. Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2023 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2023.</p> <p>2. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun</p>		<p>B03: 1. Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2023.</p> <p>2. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode Januari – Maret 2023.</p>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Anggaran 2022) Periode Januari – Maret 2023.</p> <p>B06: 1. Terbitnya Pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota. 2. Pelatihan/Bintek untuk APPP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) Periode April – Juni 2023</p>		<p>B06: 1. Scan Pedoman reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota 2. Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bintek PPRG bagi APPP antara lain : undangan/Nota dinas, absensi, notulen dan dokumentasi. 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode April – Juni 2023</p>
				<p>B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 3. Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) Periode Juli – September 2023</p>		<p>B09: 1. Scan Surat Perintah Tugas Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten/Kota 2. Scan hasil Review PPRG pada SKPD Kabupaten/Kota 3. Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode Juli – September 2023</p>
				<p>B12: Pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) Periode Oktober – Desember 2023</p>		<p>B12: Scan hasil pemeriksaan implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) periode Oktober – Desember 2023</p>
		Tersedianya Pedoman Reviu Terhadap PPRG di Pemerintah Kab/Kota	Penyusunan pedoman Reviu yang memuat PPRG	<p>B03 : Tersusnya draft pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota</p>		<p>B03 : Scan draft pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten Kota</p>

1

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12	HASIL VERIFIKASI PROVINSI	DATA DUKUNG
1	2	3	4	5	6	7
				B06: Terbitnya Pedoman Reviu yang memuat PPRG di Kabupaten Kota. B09 : B12 :.....		B06: Scan Pedoman reviu yang memuat PPRG di Kabupaten/Kota B09 : B12 :
				B12 :.....		B12 :


 WALIKOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

4



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Hamka Komplek Gedung Kubuang Tigo Baleh Kota Solok

Nomor : 463 / 16 / DPMPPA- 2023

Solok, Maret 2023

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas yang disampaikan : Surat Keputusan Wali Kota
Kepada : Bapak Wali Kota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas PMPPA
Perihal : Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023
Lampiran : 2 (dua)
Catatan : -
Untuk mohon tandatangan atas : Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023

Disampaikan dengan hormat,

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DELFIANTO, S.Sos
NIP. 19681216 199010 1 001